

**MAKALAH TENTANG
KEKUASAAN DAN WEWENANG DALAM SOSIOLOGI**

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah: Sosiologi

Dosen Pengampu: Elvri Simbolon, M,Sos



Oleh:

Nicolas Sinaga (2002010109)

Dini Lumban Toruan (200201006)

**GRUP A
JURUSAN TEOLOGI
FAKULTAS ILMU TEOLOGI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas limpah berkat dan kasihNya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “ **Kekuasaan dan Wewenang dalam sosiologi**”. Adapun penyusunan makalah ini, untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah sosiologi. Kami berharap makalah ini dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh ibu Elvri simbolon, M.Sos sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Etika sosiologi.

Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki kesalahan yang kami perbuat dalam makalah ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

JUDUL.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Pembahasan

BAB II PEMBAHASAN

A. KEKUASAAN

B. HAKIKAT KEKUASAAN DAN SUMBERNYA

C. Sumber-sumber Kekuasaan

D. UNSUR-UNSUR SALURAN KEKUASAAN DAN DIMENSINYA

E. Bentuk lapisan kekuasaan

F. CARA MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN

G. WEWENANG

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ilmu sosiologi, kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dimana pemimpin selalu ada dalam berbagai kelompok baik kelompok besar seperti pemerintahan maupun kelompok kecil seperti kelompok RT sampai kelompok ibu-ibu arisan.

Dari sekelompok individu dipilih salah satu yang mempunyai kelebihan di antara individu yang lain, dari hasil kesepakatan bersama, maka munculah seorang yang memimpin dan di sebut sebagai pemimpin. Kepemimpinan adalah perilaku seseorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas sebuah kelompok menuju suatu tujuan bersama (hemphill dan Coons, 1957:7).

Dari kepemimpinan itu, maka munculah kekuasaan. kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan social yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.

Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan anggota-anggotanya. Selain itu, pemimpin juga mempunyai wewenanga untuk memerintah anggotanya. Wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup.

Maka kepemimpinan tidak akan pernah lepas dari kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur anggota-anggotanya. Dari makalah ini, penulis ingin menjelaskan bagaimana hakikat kepemimpinan, kekuasaan, dan kewenangan yang sebenarnya karena dilihat masih banyaknya orang yang menjadi pemimpin namun menyalah gunakan kekuasaannya dan kewenangannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Pengertian dari kekuasaan, dan kewenangan?
2. Sumber kekuasaan, dan cara mempertahankan kekuasaan?
3. Sumber wewenang, dan bentuk-bentuk wewenang?
4. Unsur – unsur saluran kekuasaan dan sumbernya
5. Bentuk lapisan kekuasaan?
6. Cara mempertahankan kekuasaan?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui pengertian dari kekuasaan dan kewenangan
2. Mengetahui sumber kekuasaan, dan cara mempertahankan kekuasaan?
3. Mengetahui sumber wewenang, dan bentuk-bentuk wewenang?
4. Memahami unsur – unsur saluran kekuasaan dan sumbernya
5. Memahami bentuk lapisan kekuasaan?

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 KEKUASAAN

Kekuasaan (authority) adalah kemampuan untuk memerintah dan memberi keputusan yang baik secara langsung maupun tidak mempengaruhi tindakan - tindakan pihak lainnya. Melihat sifat ilmu sosial yang tidak etis - normatif maka kekuasaan memiliki pengertian yang netral untuk melihat baik dan buruknya perlu di lihat penggunaannya bagi keperluan masyarakat.

Definisi kekuasaan, menurut para ahli sosiologi, yaitu :

- Max weber, kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan social yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.
- Selo soemardjan dan soelainan soemardi, menjelaskan bahwa adanya kekuasaan tergantung dari yang berkuasa dan yang dikuasai.
- Ralf dahrendorf, kekuasaan adalah milik kelompok, milik individu dari pada milik struktur social.
- Soerjono soekanto, kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.

Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta - juta manusia. Oleh karena itu, kekuasaan (power) sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Adanya wewenang maupun kekuasaan merupakan suatu pengaruh yang nyata atau potensial. Mengenai pengaruh tersebut, lazimnya diadakan perbedaan sebagai berikut:

1. Pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat persuasif.
2. Pengaruh tergantung atau tidak bebas menjadi aktif yang terbagi menjadi dua hal, yaitu:
 - Pihak yang berpengaruh membantu pihak yang dipengaruhi untuk mencapai tujuannya.
 - Pihak yang berpengaruh mempunyai pengaruh di dalam kemampuan.

2.2 HAKIKAT KEKUASAAN DAN SUMBERNYA

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang - orang lain. Melalui pemahaman tersebut, di manapun juga manusia berada dan bermasyarakat, fenomena kekuasaan, dalam bentuk yang bermacam-macam, pasti dimiliki oleh masyarakat tersebut. Max Weber (1946, dalam Soekanto, 2003:268) mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan - kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan - tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan - golongan tertentu.

Kekuasaan memiliki berbagai macam bentuk dan sumber untuk mendapatkannya. Sumber - sumber kekuasaan diantaranya adalah hak milik kebendaan dan kedudukan. Birokrasi pun merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus di bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu, serta atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Kekuasaan sesungguhnya terjadi di mana - mana. Pada umumnya kekuasaan tertinggi berada dalam sebuah organisasi masyarakat yang sangat besar yang bernama negara. Secara formal negara memiliki hak melaksanakan kekuasaan tertinggi, dan bilaman perlu, digunakan paksaan dalam melaksanakan kekuasaan tersebut. Negara pun membagi - bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya, hal demikian dinamakan dengan kedaulatan. Kedaulatan dijalankan oleh sekelompok kecil masyarakat sebagai *ruling class* dan setiap *ruling class* selalu ada pemimpinnya.

Pelaksanaan kekuasaan pada kenyataannya seringkali tidak semulus yang diharapkan oleh kaum yang berkuasa. Rasa ketidakpuasan dari yang dikuasai dapat saja muncul karena perbedaan - perbedaan alam pikiran yang menguasai dengan yang dikuasai. Untuk menjalankan kekuasaan secara lancar, pihak penguasa senantiasa berusaha untuk mendapatkan dukungan dari yang dikuasai. Hal ini untuk menyatakan bahwa kekuasaan yang diselenggarakan memiliki legitimasi atau legal dan baik bagi masyarakat bersangkutan. Untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain, golongan yang berkuasa harus berupaya menanamkan kekuasaannya melalui jalan menghubungkan dengan kepercayaan dan perasaan-perasaan yang kuat di dalam masyarakat. Cara ini pada dasarnya terwujud dalam nilai dan norma (Mosca, 1939, dalam Soekanto, 2003:269).

2.3 Sumber-sumber Kekuasaan

Sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki para penguasa atau pemimpin, dalam masyarakat informal maupun formal adalah :

- Seseorang yang mempunyai harta benda (kekayaan) yang lebih banyak, sehingga mempunyai keleluasan untuk bergerak dan mempengaruhi pihak lain.
- Dengan status tertentu, seseorang dapat memberikan pengaruhnya atau memaksa pihak lain supaya melakukan sesuatu sesuai kehendaknya.
- Wewenang legal atas dasar peraturan-peraturan formal (hukum) yang dimiliki seseorang, dapat memberikan kekuasaan pada seseorang untuk mempengaruhi pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan.
- Kekuasaan dalam pula tumbuh dari adanya kepercayaan khalayak, seperti tradisi, kesucian, dan adat istiadat.
- Kekuasaan yang tumbuh dari kharisma atau wibawa seseorang.
- Kekuasaan yang didasarkan pada pedelegasian wewenang.
- Kekuasaan yang tumbuh dari pendidikan, keahlian, serta kemampuan.

2.4 UNSUR-UNSUR SALURAN KEKUASAAN DAN DIMENSINYA

Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antara kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) Rasa takut, perasan takut kepada penguasa membuat pihak lain memunculkan sikap patuh terhadap segala kemauan dan tindakan penguasa yang ditakuti.
- 2) Rasa cinta, kecintaan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana halnya rasa takut, kecintaan terhadap penguasa akan menimbulkan kepatuhan karena rasa menyenangkan semua pihak.
- 3) Kepercayaan, kepercayaan merupakan hasil dari hubungan simetris yang asosiatif. Dasar kepercayaan didapatkan karena masing-masing pihak telah mengetahui pihak lain. Melalui rasa kepercayaan, segala keinginan suatu pihak akan dilaksanakan pencapaiannya oleh pihak lain, meski dalam tataran tertentu pihak yang melaksanakan keinginan tidak mengetahui secara pasti maksud dari pihak yang memiliki keinginan.
- 4) Pemujaan, memberi arti bahwa penguasa adalah pihak yang dipuja. Akibatnya, apapun yang dilakukan oleh pihak yang dipuja selalu benar, atau setidaknya dianggap sebagai kebenaran.

Apabila dilihat dalam masyarakat, maka kekuasaan di dalam pelaksanaannya melalui saluran-saluran, sebagai berikut:

1. Saluran Militer, penguasa lebih cenderung menggunakan paksaan dengan maksud menimbulkan rasa takut masyarakatnya, sehingga tunduk pada kemauan penguasa.
2. Saluran Ekonomi, penguasa cenderung menguasai sendi-sendi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penguasaan atas sendi pemenuhan kebutuhan hidup tersebut membuat rakyat tidak memiliki pilihan lain dan penguasa dapat melaksanakan perintah-perintahnya melalui peraturan-peraturan yang disertai atribut sanksi.
3. Saluran Politik, penguasa membuat peraturan melalui badan-badan yang bewenang dan sah menurut masyarakat. Hal ini dibuat untuk meyakinkan dan memaksa masyarakat mentaati peraturan yang dikeluarkan penguasa.
4. Saluran Tradisional, terjadi menyesuaikan antara tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kesesuaian tersebut membuat pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan lancar.
5. Saluran Ideologi, doktrin-doktrin atau ajaran dikeluarkan penguasa yang bertujuan menerangkan sekaligus menjadi pembenaran pelaksanaan kekuasaannya. Doktrin dan ajaran yang dikeluarkan disampaikan secara berulang dan masuk ke dalam ranah bawah sadar masyarakat, sehingga doktrin tersebut terinternalisasi dalam jiwa masyarakatnya.

2.5 Bentuk lapisan kekuasaan

Bentuk dan system kekuasaan selalu menyesuaikan diri pada masyarakat dengan adat-istiadat dan pola-pola perilakunya. Pada umumnya garis tegas antara yang berkuasa dengan yang dikuasai selalu ada sehingga menimbulkan lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan. Karena integrasi masyarakat dipertahankan oleh tata tertib social yang dijalankan oleh penguasa, maka masyarakat mengakui adanya lapisan kekuasaan tersebut. Adanya paktor pengikat antara warga-warga masyarakat adalah atas dasar gejala, bahwa ada yang memerintah ada yang diperintah.

Menurut Macleaver ada tiga pola umum system lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu :

1. Tipe kata

Tipe kata adalah system lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta. Garis pemisah antara masing-masing lapisan hampir tak mungkin ditembus.

Pada puncak piramida paling atas, duduk penguasa tertinggi (misalnya maharaja dan raja) dengan likungannya, yang didukung oleh kaum bangsawan, tentara, dan para pendeta.

Lapisan kedua terdiri dari para petani dan buruh tani yang kemudian diikuti dengan lapisan terendah dalam masyarakat yang terdiri dari para budak.

2. Tipe oligarkis

Tipe oligarkis adalah tipe yang dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama pada kesempatan yang diberikan kepada para warga untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Kedudukan para warga pada tipe oligarkis masih didasarkan pada kelahiran ascribed status tetapi individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan.

Kaum industry, perdagangan dan keuangan memegang peran penting. Ada bermacam-macam cara di mana warga dari lapisan bawah naik tingkat lapisan dan ada juga ada kesempatan bagi warga lapisan menengah untuk menjadi penguasa.

Variasi tipe oligarkis dijumpai pada Negara-negara yang didasarkan pada aliran fasisme dan juga pada Negara-negara totaliter (misalnya soviet dan rusia). Bedanya adalah bahwa kekuasaan yang sebenarnya, berada di tangan partai politik yang mempunyai kekuasaan menentukan.

3. Tipe demokratis

Tipe demokratis menunjukkan kenyataan akan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobile. Kelahiran tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang juga factor keberuntungan.

Gambaran pola piramida kekuasaan merupakan tipe-tipe ideal atau tipe-tipe idaman. Di dalam kenyataan dan perwujudannya tidak jarang mengalami penyimpangan, disebabkan karena masyarakat yang mengalami perubahan social dan kebudayaan.

2.6 CARA MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN

Setiap penguasa memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya. Manusia menurut hakikatnya selalu memiliki hasrat untuk berkuasa, baik berkuasa untuk dirinya maupun berkuasa untuk pihak lain. Karenanya mempertahankan kekuasaan menjadi hal yang penting dalam konteks penguasa, diperlukan suatu cara untuk mempertahankannya, yaitu:

- Menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik
- Mengadakan sistem-sistem kepercayaan (belief-systems) yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya.
- Melaksanakan adminitrasi dan birokrasi yang baik.
- Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal.

2.7 WEWENANG

Wewenang merupakan kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Wewenang memiliki arti sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan, dan menyelesaikan pertentangan. Hak tersebut dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang; dengan demikian wewenang memiliki tekanan pada hak bukan pada kekuasaannya. Kekuasaan tanpa wewenang dapat dianggap kekuatan yang dianggap tidak sah oleh masyarakat. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar kekuasaan tersebut memiliki wewenang.

Definisi wewenang, menurut para ahli sosiologi, yaitu :

- George R. Terry, menjelaskan bahwa wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas / tingkah laku perorangan dan grup.
- Mac Iver R.M, wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan social, yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan, keputusan, dan permasalahan penting dalam masyarakat.
- Soerjono Soekanto, bila orang-orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.
- Max weber, wewenang adalah sebagai kekuasaan yang sah.

Bentuk-bentuk wewenang secara umum terbagi atas empat bentuk, yaitu:

1. Wewenang kharismatis, tradisional, dan legal.

Wewenang kharismatis tidak diatur oleh kaidah-kaidah melainkan pada kemampuan khusus bersifat gaib pada diri seseorang. Wewenang tradisional merujuk pada kaidah seseorang merupakan bagian dari kelompok yang sudah lama memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Wewenang rasional disandarkan pada kaidah atau sistem hukum yang berlaku dan wewenangnya memiliki jangka waktu yang terbatas.

2. Wewenang resmi dan tidak resmi

Wewenang resmi bersifat sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Wewenang tidak resmi dapat merupakan hasil dari sifat kondisional dalam masyarakat, sehingga tidak bersifat sistematis meski melalui perhitungan-perhitungan yang rasional.

3. Wewenang pribadi dan teritorial

Wewenang pribadi bergantung pada solidaritas antara anggota kelompok dan berpusat pada seseorang tanpa mengenal batas (contoh petani dengan buruh tani). Wewenang teritorial menekankan pada sentralisasi wewenang yang didasarkan pada wilayah tempat tinggal (contoh RT atau RW).

4. Wewenang terbatas dan menyeluruh

Dikatakan wewenang terbatas apabila tidak mencakup semua sektor kehidupan atau terbatas pada bidang tertentu. Wewenang menyeluruh adalah wewenang yang tidak terbatas ada suatu bidang saja, melainkan pada keseluruhan bidang kehidupan masyarakat.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kekuasaan dan wewenang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam kehidupan kelompok sosial di masyarakat.

Kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.

Wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup.

Sumber kekuasaan terdiri dari harta benda, status, wewenang legal, kharisma, dan pendidikan. Selain itu unsure kekuasaan juga berpengaruh yaitu meliputi: rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Lapisan kekuasaan yaitu tipe kata, tipe oligarkis, dan tipe demokratis.

3.2 Saran

Biarlah hendaknya kekuasaan dan wewenang berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan peran dari setiap masing-masing

Daftar Pustaka

<http://esai-esai.blogspot.com/.../makalah-kekuasaan-wewenang-...>
<http://agan-diasmara.blogspot.com/.../kekuasaan-dan-wewenang...>
<http://www.scribd.com/doc/26302222/Kekuasaan-Dan-Wewenang>
<http://rian-ardhie.blogspot.com/.../pengertian-dan-perbedaan-...>